

## BAB 1

### LATAR BELAKANG

#### A. Latar Belakang

Pajak merupakan pungutan wajib yang ditanggungkan kepada rakyat Indonesia untuk negara dan akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum. Pajak juga salah satu sumber penerimaan terbesar negara di Indonesia. UUD 1945 sudah menetapkan kewajiban perpajakan sebagai salah satu perwujudan kewajiban negara dan peran untuk mewujudkan negara yang adil makmur dan sejahtera. Semakin besar pola tingkat kesadaran membayar pajak semakin besar pula pendapatan yang diperoleh negara.

Perananan penerimaan negara melalui pajak bisa berasal dari pajak penghasilan (Pph), pajak pertambahan nilai (Ppn), pajak penjualan atas barang mewah (Ppn BM), bea materai, pajak bumi dan bangunan (PBB), bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), Pajak Propensi dan pajak kabupaten/kota. Hal ini menunjukkan bahwa rakyat Indonesia memiliki pengaruh pada roda perputaran pertumbuhan ekonomi negara. Salah satu penyebab peningkatan penerimaan pajak diatas adalah karena pemerintah telah melakukan reformasi perpajakan dengan menerapkan *self asessment system* dalam pemungutan pajak yang diberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan seluruh

pajak yang menjadi kewajibannya sendiri dengan diawasi oleh Direktorat Jendral Pajak.

Pajak sebagai salah satu integral dari penerimaan negara oleh karena itu, upaya pemerintah dalam melakukan peningkatan dan penerimaan negara harus dilakukan secara optimal mulai dari melakukan sosialisasi tentang pentingnya pajak bagi negara sampai adanya denda atau sanksi administratif bagi pelanggar pajak. Sektor pajak merupakan pilihan yang sangat tepat karena jumlahnya yang relatif stabil juga merupakan cerminan kesadaran aktif masyarakat dalam membiayai pembangunan.

Pajak di Indonesia tidak membebaskan untuk membayar pajak bagi masyarakat Indonesia yang keberatan untuk membayar pajak dengan mengajukan permohonan surat keterangan bebas atau disebut dengan SKB. SKB sendiri merupakan surat keterangan bebas pemotongan dan/ atau pemungutan PPh bagi wajib pajak yang memiliki peredaran bruto dibawah PTKP. Sama halnya dengan surat keterangan yang menyatakan bahwa wajib pajak dikenai PPh yang bersifat final berdasarkan PP Nomor 46 Tahun 2013 tentang PPh atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto dibawah PTKP dan dibebaskan dari pemotongan dan/ atau pemungutan PPh oleh pihak lain yang dapat dikreditkan.

Wajib pajak dapat mengajukan Surat Keterangan Bebas Pemotongan Pasal 21, Pemungutan PPh Pasal 22, Potongan PPh Pasal 23, Potongan Final, Pemungutan Pertambahan Nilai, Pemungutan PPnBM atas

Impor atau Penyerahan Kendaraan Bermotor. Dalam hal ini penulis akan membahas tentang Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat 2 atas Penghasilan dan Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan. Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan dilatar belakangi dari pemikiran bawasannya tanah dan/atau bangunan sebagai salah satu fungsi sosial, disamping memenuhi kebutuhan dasar papan dan lahan usaha juga memberikan nilai ekonominya bagi pemilik. Oleh karena itu, setiap harta atau penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan wajib memberikan sebagian dari nilai ekonominya yang diberikan kepada negara melalui pembayaran pajak.

Pada prakteknya langsung ada beberapa wajib pajak yang kurang mampu memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak Penghasilan final pasal 4 ayat 2. Oleh karena itu, wajib pajak dapat mengajukan Surat Keterangan Bebas pajak yang sudah diatur oleh Direktur Jendral Pajak Nomor PER-30/PJ/2009 tanggal 27 April 2009 tentang Tata Cara Pemberian Pengecualian dari kewajiban Pembayaran Atau Pemungutan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah Dan/ Atau Bangunan dan Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-28/PJ/2009 tanggal 27 April 2009 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam Tugas Akhir ini sebagai berikut :

1. Bagaimana Prosedur pelaksanaan pemberian Surat Keterangan Bebas pajak atas transaksi pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singosari ?
2. Apa yang menyebabkan permohonan Surat Keterangan Bebas pajak pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan ditolak atau diterima pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singosari ?

## **C. Batasan Masalah**

Pembahasan yang diperlukan bagi penulis agar lebih terarah dan tidak meluas maka permasalahan yang akan dibahas dalam isi Tugas Akhir ini akan dibatasi pada :

1. Prosedur pelaksanaan pemberian Surat Keterangan Bebas pajak atas transaksi pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singosari.
2. Penyebab permohonan Surat Keterangan Bebas pajak pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan ditolak atau diterima pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singosari.

## **D. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan masalah yang telah dirumuskan, penulis ingin memberikan tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui prosedur pelaksanaan pemberian Surat Keterangan Bebas pajak atas transaksi pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singosari.
2. Untuk mengetahui penyebab permohonan Surat Keterangan Bebas pajak pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan ditolak atau diterima pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singosari.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Penulis mengharapkan akan memberikan manfaat kepada pembaca sebagai berikut :

1. Bagi kantor Pelayanan Pajak Pratama Singosari

Hasil dari penelitian ini dapat menunjukkan seberapa efektif pemeberian Surat Keterangan Bebas Pajak atas Pengalihan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan yang dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singosari terhadap wajib pajak yang mengajukan Surat Keterangan Bebas Pajak atas Pengalihan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan.

2. Bagi Penulis Selanjutnya

Penulis selanjutnya dapat menggunakan tulisan ini sebagai acuan dalam melakukan penelitian topik sejenis guna mengetahui perbandingan agar dapat memperbaiki kekurangan dalam penulis sebelumnya.